

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Sejak proses perundingan dalam konflik hidrokarbon Bolivia dimulai, topik utama yang berkembang lebih didominasi oleh permasalahan harga ekspor gas Bolivia ke Brazil. Dalam perkembangannya, tercipta atmosfer ketegangan dalam proses negosiasi yang cukup panjang dikarenakan selalu menemui jalan buntu. Negosiasi yang seharusnya dapat terselesaikan dalam jangka waktu 180 hari, pada kenyataannya harus melalui proses yang lebih panjang. Meskipun demikian proses negosiasi pada akhirnya dapat diakhiri dengan kesepakatan antara Bolivia dan Brazil.

Lula da Silva Presiden Brazil telah menghadapi konflik dengan Bolivia dengan baik. Sejak awal Lula memiliki sikap damai menghadapi masalah tersebut dan tidak melupakan tujuan utama yaitu integrasi regional kawasan Amerika Selatan. Selain itu, Brazil tidak tertarik untuk menjerumuskan diri dalam ketegangan dengan Bolivia sejak kebutuhan akan energinya sangat bergantung pada gas Bolivia. Namun, Lula harus memuaskan Petrobras dan publik dalam negerinya. Dengan demikian, Lula mengambil sikap yang lebih kuat pada momen yang paling kritis dan berhasil memaksa pembatalan Resolusi Menteri Hidrokarbon yang dianggap sebagai ancaman besar bagi keberadaan Petrobras di Bolivia.

Posisi Brasil yang lebih agresif terhadap Bolivia tampak telah memberikan hasil yang baik. Hal ini tentu saja memberikan kepuasan bagi Brazil dan Petrobras terutama mengenai pasokan gas alam ke Brazil meskipun keuntungan yang diperoleh Petrobras menurun dan harga gas di Brazil harus mengalami peningkatan.

Di sisi lain, Morales Presiden Bolivia menunjukkan sikap tegas dalam proses perundingan dengan Brazil, meskipun terkadang ancaman yang ditujukan kepada Brazil beresiko besar dalam proses nasionalisasi. Ancaman yang paling serius adalah diajukannya kasus tersebut ke badan arbitrase internasional. Demi terwujudnya cita-cita negara untuk merealisasikan nasionalisasi, maka Morales pun menurunkan agresifitasnya dalam negosiasi, namun tetap dalam pendirian yang tegas dan semangat nasionalisasi rakyatnya.

Keberhasilan yang diperoleh Morales adalah menekan Brazil untuk menaikkan harga ekspor gas dan kemenangan dalam merampungkan kontrak baru dengan Petrobras. Dengan demikian Morales telah menunjukkan bahwa dirinya bukan merupakan pemimpin yang lemah seperti pemimpin Bolivia sebelumnya yang tidak mengabdikan suara rakyat mayoritas. Evo Morales telah berhasil menaikkan posisi tawar Bolivia. Dia telah menunjukkan bagaimana sebuah negara miskin tidak bisa dengan seenaknya dinjak-injak oleh penguasa modal. Khususnya kepada Brazil, dia menunjukkan bahwa meskipun Brasil merupakan pemimpin regional di kawasan Amerika Latin, namun Bolivia tetap berani memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Ancaman yang ditujukan pada Bolivia ditanggapi dengan padat dan

tegas, bahwa pintu terbuka bagi perusahaan asing yang ingin meninggalkan Bolivia keberatan terhadap nasionalisasi.

Pada dasarnya kedua negara saling membutuhkan satu sama lain. Nasionalisasi Morales yang tanpa pengambilalihan secara penuh dimaksudkan untuk tetap mengikat kerjasama dengan Petrobras yang memiliki teknologi lebih dalam pengolahan gas alam. Petrobras dan Brazil yang pada dasarnya bisa mengajukan kasus nasionalisasi ke badan arbitrase internasional pun lebih meilih untuk melanjutkan kerjasama dengan resiko kenaikan harga demi tuntutan ekonomi dan kebutuhan energi domestik. Pilihan untuk membawa kasus tersebut ke badan arbitrase internasional pun pada dasarnya juga tidak akan terlalu membantu Brazil, mengingat keterbatasan ekonomi Bolivia sudah dipastikan akan menyebabkan negara ini tidak akan mampu membayar jumlah ganti rugi tersebut

Dengan melihat pada proses resolusi konflik dan hasil kesepakatan yang disepakati, dapat disimpulkan adanya beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses dan hasil tersebut. Pertama, kebijakan nasionalisasi ala Morales pada dasarnya lebih diartikan sebagai upaya proteksi terhadap kekayaan alamnya ketimbang nasionalisasi murni. Hal ini tampak dalam tuntutan minimal yang ingin diamankan oleh Bolivia yaitu kewenangan untuk memperoleh penerimaan bagian yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan demikian, tuntutan kebijakan nasionalisasi Bolivia tidaklah sekeras apa yang telah digemborkan sebelumnya.

Kedua, ketergantungan Bolivia terhadap Brazil sangat besar. Brazil merupakan investor dan konsumen hidrokarbon yang utama. Proses pemasaran akan

berjalan ketika pasar atau konsumen sudah dikuasai. Apabila Brazil tidak bersedia melakukan renegotiasi kontrak, maka proses produksi gas Bolivia akan terhambat. Dengan tidak adanya konsumen utama, dapat dipastikan aktifitas bisnis di sektor hidrokarbon semakin tidak menguntungkan. Hal ini dapat mendorong investor asing lainnya untuk menarik investasi mereka dikarenakan tidak ada lagi ketertarikan ataupun kepercayaan setelah investor utama berhenti beroperasi di Bolivia. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pun menyebabkan Bolivia bergantung pada Brazil untuk mengeksplorasi dan memproduksi hidrokarbon. Pada akhirnya, kepentingan Bolivia meraup pendapatan yang tinggi dan memakmurkan rakyatnya dari nasionalisasi hidrokarbon akan sulit tercapai.

Ketiga, ketergantungan Brazil yang relatif tinggi terhadap gas Bolivia telah menyebabkan Brazil harus terus mengikatkan dirinya pada pasokan gas Bolivia khususnya pasokan di bidang industri Brazil, terlebih lagi untuk menanggulangi *blackout* akibat kurangnya sumber energi.

Keempat, adanya pertimbangan kesamaan ideologi yang beraliran kiri (sosialis) antara kedua negara, telah mendorong keduanya untuk mempertahankan hubungan dan image positif yang baik antar sesama negara sosialis, khususnya di hadapan dunia internasional. Faktor ideologi ini pun cukup mempengaruhi pendekatan yang diambil Brazil, mengingat konstitusi Brazil juga mengakui kewenangan penuh negara dalam mengatur dan mengelola kekayaan alam di wilayahnya, secara khusus untuk tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Dengan demikian, interdependensi antara keduanya ini telah menimbulkan

kesadaran bahwa semua kepentingan akan dapat tercapai jika Petrobras tetap mempertahankan bisnisnya di sektor gas Bolivia. Faktor ideologi sendiri, walaupun bukanlah merupakan faktor pendorong utama, namun cukup berpengaruh dalam menjamin adanya itikad yang baik antara kedua belah pihak, yang berkontribusi dalam mengarahkan keduanya ke dalam jalur interaksi yang konstruktif dan menuju pada penyelesaian permasalahan secara damai.

Penggunaan energi sebagai instrumen kebijakan luar negeri sangat sensitif dan membutuhkan keterampilan manajemen yang tinggi dalam politik dan diplomasi. Salah perhitungan menciptakan peluang besar bagi konflik dan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan di antara para pelaku. Memulihkan kepercayaan kemudian menjadi suatu proses yang panjang dan sulit, bahkan terkadang lebih mahal daripada energi itu sendiri, mengingat bahwa dampak dari kebijakan energi sifatnya global melampaui wilayah dan negara.

Pada akhirnya aktivitas tawar menawar dalam kerangka negosiasi telah menjadi suatu instrumen penting untuk membawa hubungan antar negara di kawasan Amerika Selatan kembali normal. Pemerintah Bolivia telah bergerak dengan tindakan yang paling nasionalis dalam manajemen hidrokarbon. Tindakan Bolivia ini telah membuat Brazil lebih percaya diri dalam kekuatan perjanjian dan kerjasama dengan Bolivia yang baru saja disepakati oleh keduanya. Dengan demikian stabilitas politik di kawasan tersebut dapat terjaga tanpa menimbulkan suatu konflik yang terbuka.